

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Fairuziah Mumtaz¹, Siti Nurhalimatus Sa'diyah², Stella Salsabil³, Tiara Ramadhanty Ruliff⁴, Lutfi Arrya Saputra⁵, Ariq Maulana⁶, Saifuddin Zuhri⁷

Email: 24025010122@student.upnjatim.ac.id, 24025010121@student.upnjatim.ac.id,
24025010127@student.upnjatim.ac.id, 24025010095@student.upnjatim.ac.id,
24051010127@student.upnjatim.ac.id, 24051010077@student.upnjatim.ac.id,
zuhri@gmail.com

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstrack

This article analyzes the crucial role of Citizenship Education (PKn) in strengthening multicultural education in Indonesia. Considering that Indonesia is a country rich in ethnic, religious, and cultural diversity, PKn holds a strategic position as the main vehicle for instilling values of tolerance, mutual respect, and awareness of social pluralism. This research examines the definitions and objectives of PKn and multicultural education, explores the conceptual relationship and synergy between the two, and identifies the strategic role of PKn in promoting diversity, shaping moral character, enhancing comprehensive understanding, and addressing conflict and radicalism. The discussion also includes the implementation of multicultural education in PKn learning, including the roles of teachers and the school environment, as well as case studies of best practices. Lastly, this article outlines the challenges faced and the opportunities for developing multicultural-based civic education (PKn), offering recommendations for strengthening it in the future in order to maintain the unity and integrity of the nation. Civic education is not just a subject, but a fundamental pillar for national cohesion in a diverse society.

Keywords: education, multicultural, citizenship

Abstrak

Artikel ini menganalisis peran krusial Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam memperkuat pendidikan multikultural di Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman etnis, agama, dan budaya, PKn memiliki posisi strategis sebagai wahana utama untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kesadaran pluralisme sosial. Penelitian ini mengkaji definisi dan tujuan PKn serta pendidikan multikultural, menelaah hubungan konseptual dan sinergi antara keduanya, dan mengidentifikasi peran strategis PKn

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dalam mempromosikan keberagaman, membentuk karakter moral, meningkatkan pemahaman komprehensif, serta menanggulangi konflik dan radikalisme. Pembahasan juga mencakup implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran PKn, termasuk peran guru dan lingkungan sekolah, serta studi kasus praktik terbaik. Terakhir, artikel ini menguraikan tantangan yang dihadapi dan peluang pengembangan PKn berbasis multikultural, menawarkan rekomendasi untuk penguatan di masa depan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. PKn tidak hanya menjadi mata pelajaran, melainkan pilar fundamental bagi kohesi nasional dalam masyarakat yang majemuk.

Kata kunci: Pendidikan, multikultural, kewarganegaraan

PENDAHULUAN

Latar Belakang Konteks Keberagaman Indonesia dan Pentingnya Pendidikan Indonesia, sebagai negara kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke, memiliki kekayaan luar biasa berupa keragaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Di satu sisi, keberagaman ini merupakan aset berharga dan identitas nasional yang kuat. Namun di sisi lain, ia juga membawa tantangan besar, seperti potensi konflik horizontal, kekerasan berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), serta tindakan diskriminatif. Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan berbagai peristiwa kelam yang menegaskan pentingnya sikap saling menghargai dan toleransi terhadap perbedaan dalam masyarakat.

Dalam konteks kompleksitas keberagaman tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Pendidikan, terutama Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), merupakan sarana sistematis untuk menanamkan pemahaman mengenai pentingnya hidup rukun dan damai di tengah perbedaan. PKn bukan sekadar pelajaran pelengkap, tetapi merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan sosial bangsa. Keberadaannya sebagai mata pelajaran wajib yang memiliki landasan kuat dalam konstitusi dan kurikulum nasional mencerminkan kesadaran negara bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas dan mendorong kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, PKn berperan sebagai sarana rekayasa sosial yang dirancang untuk menciptakan keharmonisan jangka panjang serta mencegah konflik akibat perbedaan internal yang berpotensi merusak persatuan bangsa.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Multikultural, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia didefinisikan secara luas sebagai "Pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis". Lebih lanjut, PKn juga dipahami sebagai "pengembangan pendidikan nilai, yaitu pendidikan yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa". Statusnya sebagai mata pelajaran wajib dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi

menunjukkan urgensinya dalam sistem pendidikan nasional. Dalam pengertian yang lebih luas, PKn (citizenship education) memiliki perspektif global yang bertujuan untuk membentuk individu menjadi warga negara Indonesia yang religius, berkeadaban, dan berjiwa nasionalisme.

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) memiliki peran sentral dalam pendidikan multikultural di Indonesia, yang bertujuan membentuk kesadaran pluralisme sosial dan menghargai keberagaman budaya, agama, suku bangsa, serta nilai-nilai dalam masyarakat. Melalui PKn, peserta didik diajarkan untuk memahami dan menghormati perbedaan, menumbuhkan sikap toleransi, persatuan, dan keadilan sosial, sekaligus mencegah konflik dan radikalisme. Pendidikan ini menjadi sangat penting di tengah kemajuan zaman yang membawa potensi ancaman internal maupun eksternal, sehingga PKn berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Agil Nanggala, 2020).

Secara ilmiah, PKn sebagai pendidikan multikultural memiliki tujuan dan struktur keilmuan yang mendukung pemberian pemahaman komprehensif kepada peserta didik agar secara sukarela menjaga kemultikulturalan bangsa. Pendidikan ini juga membentuk moralitas peserta didik agar sadar dan berkomitmen merawat keberagaman sebagai wujud keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta implementasi nyata konsep warga negara yang baik dan cerdas (Jurnal LLDIKTI, 2020). Dengan demikian, PKn tidak hanya mengajarkan aspek normatif kewarganegaraan tetapi juga menanamkan nilai-nilai inklusif yang sangat relevan dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk.

Peran PKn semakin strategis di era Revolusi Industri 4.0, di mana pendidikan berbasis multikultural sangat dibutuhkan untuk mencegah dan mengurangi konflik sosial yang kerap terjadi akibat perbedaan budaya dan identitas. Melalui pendidikan ini, peserta didik diharapkan memiliki sikap terbuka, mampu menghargai dan memahami keberagaman yang ada di Indonesia, serta berperan dalam membangun dan melestarikan keberagaman tersebut sebagai kekuatan bangsa dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika (Kusumaningrum, 2019).

Selain itu, PKn juga berfungsi sebagai wahana pembentukan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan wawasan kebangsaan. Pendidikan ini menanamkan sikap religius, nasionalisme, patriotisme, dan toleransi yang menjadi fondasi penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta meminimalisir praktik kekerasan, diskriminasi, dan konflik SARA (Agil Nanggala, 2020). Dengan demikian, PKn berperan sebagai pendidikan multikultural yang menguatkan paradigma keberagaman tanpa paksaan, melainkan dengan kesadaran dan keyakinan peserta didik terhadap pentingnya hidup berdampingan secara harmonis (JPTAM, 2021). Secara keseluruhan, pendidikan kewarganegaraan memegang peranan vital dalam menginternalisasi nilai-nilai multikulturalisme di Indonesia. Melalui PKn, peserta didik dibekali bukan hanya pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga sikap dan moral yang inklusif, toleran, dan berwawasan kebangsaan, sehingga mampu menjaga dan merawat keberagaman sebagai kekayaan bangsa yang harus dilestarikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods), yaitu gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan melalui studi kepustakaan (library research) dengan tujuan menelaah berbagai literatur yang relevan mengenai konsep, tujuan, dan implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam pendidikan multikultural. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen akademik yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan integrasi nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran kewarganegaraan.

Sementara itu, pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara daring melalui platform Google Form yang ditujukan secara khusus kepada kalangan mahasiswa. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur persepsi mahasiswa terhadap pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk sikap toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, serta kontribusinya dalam menanamkan nilai-nilai multikultural di lingkungan kampus. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive, dengan sasaran responden mahasiswa dari berbagai program studi yang memiliki pengalaman mengikuti mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Data yang terkumpul dari kuesioner dianalisis secara deskriptif dengan menyajikan frekuensi dan persentase untuk menggambarkan kecenderungan pandangan mahasiswa terhadap topik yang dikaji.

Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang utuh. Kajian kualitatif menawarkan pemahaman konseptual dan normatif, sedangkan data kuantitatif dari mahasiswa menyajikan realitas empirik di lapangan. Dengan mengintegrasikan keduanya, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan analisis yang komprehensif dan relevan mengenai bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan dapat berperan secara efektif dalam memperkuat pendidikan multikultural di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa sebagai agen perubahan sosial

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Hasil kuisisioner Tingkat pemahaman materi

Hasil dari Kuisisioner Pendidikan Kewarganegaraan dan Keberagaman menunjukkan memiliki 27 responden mahasiswa dari berbagai macam bidang studi. Hasil kuisisioner menunjukkan bahwa tingkat pemahaman yang dimiliki dari 27 responden mahasiswa merasa cukup memahami materi pendidikan kewarganegaraan yaitu sebanyak (20 mahasiswa), sebanyak 6 mahasiswa merasa sangat memahami, dan hanya ada 1 mahasiswa yang ternyata kurang dalam memahami materi pendidikan kewarganegaraan.



Gambar 2. Hasil kuisisioner terhadap nilai toleransi dan keberagaman

Selanjutnya yaitu hasil dari pandangan terhadap nilai toleransi dan keberagaman terdapat 17 responden mahasiswa yang menilai materi pendidikan kewargamegaraan sangat jelas mengandung nilai toleransi, keadilan sosial, dan menghargai terhadap keberagaman. Tetapi terdapat 10 responden mahasiswa yang menilai bahwa nilai nilai toleransi, keadilan sosial, dan menghargai terhadap keberagaman tersebut ada, namun kurang mendalam.



Gambar 3. Hasil kuisisioner diskusi isu keberagaman di kelas

Hasil dari diskusi isu keberagaman di kelas menunjukkan bahwa sebanyak 11 responden mahasiswa menyatakan sering berdiskusi tentang isu keberagaman berupa (SARA, budaya, serta gender) di dalam kelas. Namun terdapat 5 koresponden mahasiswa yang menyatakan kadang-kadang dalam berdiskusi, dan 5 responden mahasiswa menyatakan jaeang dalam berdiskusi tentang isu keberagaman berupa (SARA, budaya, serta gender) di dalam kelas.



Gambar 4. Hasil kuisisioner dorongan sikap terbuka dalam kegiatan pembelajaran

Hasil dari dorongan sikap terbuka dalam kegiatan pembelajaran menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa sejumlah 18 mahasiswa, merasa dosen cukup mendorong sikap terbuka terhadap perbedaan. Namun terdapat 7 responden mahasiswa merasa sangat mendorong terhadap sikap terbuka terhadap perbedaan, serta terdapat 2 responden mahasiswa yang merasa kurang membantu terhadap sikap terbuka terhadap perbedaan.



Gambar 5. Hasil kuisisioner peran Pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk sikap toleransi

Hasil dari peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk sikap tolen menunjukkan bahwa terdapat 16 responden mahasiswa yang merasa pendidikan kewarganegaraan cukup membantu membentuk sikap toleransi. 9 responden mahasiwa merasa

sangat membantu jika pendidikan kewarganegaraan cukup membantu membentuk sikap toleransi. Serta terdapat 2 responden mahasiswa yang merasa kurang membantu.

yang merasa kurang membantu.



Gambar 6. Hasil kuisioner pengaruh nilai kewarganegaraan terhadap sikap kepada teman yang berbeda latar belakang

Hasil dari pengaruh nilai terhadap sikap kepada teman yang berbeda latar belakang menunjukkan bahwa sebanyak 16 responden mahasiswa mengaku nilai-nilai yang dipelajari sedikit berpengaruh terhadap sikap mereka kepada teman dari latar belakang yang berbeda. Namun terdapat 11 responden merasa *sangat berpengaruh*.

Beberapa kutipan pendapat responden menunjukkan. Pendidikan Kewarganegaraan dinilai efektif menanamkan sikap saling menghormati, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman di kampus. Materi tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta hak asasi manusia dianggap memperkuat kesadaran akan pentingnya perbedaan sebagai kekuatan, bukan ancaman. Pembelajaran mendorong mahasiswa untuk berpikiran terbuka, inklusif, dan aktif membangun lingkungan kampus yang harmonis. Diskusi tentang isu keberagaman di kelas membantu mahasiswa memahami dan mengelola perbedaan, meski intensitas diskusi masih bervariasi antar kelas. Ada juga catatan bahwa pengaruh nilai-nilai tersebut pada perilaku nyata mahasiswa masih *bervariasi*, dari yang sangat terasa hingga hanya sedikit berpengaruh.

Indonesia sebagai bangsa yang religius tentunya memiliki nilai moral, etika, dan norma yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut penting baik bagi pejabat negara dalam menjalankan roda pemerintahan demi tercapainya tujuan nasional baik umum maupun khusus yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian, maupun bagi

warga negara dalam mengisi kemerdekaan dan mewujudkan kepentingan bersama. Moralitas memiliki peran penting sebagai pondasi utama dalam memastikan bahwa bangsa ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai jati dirinya.

Dalam konteks menjaga keberagaman budaya (kemultikulturalan) bangsa, moralitas menjadi aspek krusial. Masyarakat yang bermoral akan cenderung mengedepankan kepentingan umum, menjaga integrasi sosial dan kohesi sosial, serta menghindari tindakan diskriminatif dan potensi konflik lainnya. Mengingat Indonesia adalah bangsa yang majemuk secara budaya, sangat mudah bagi masyarakatnya untuk terprovokasi oleh isu-isu sensitif seperti suku, agama, ras, antarbudaya, dan gender. Oleh karena itu, penting untuk menjaga sikap demi memelihara persatuan nasional. Bila terdapat persoalan terkait isu-isu tersebut, idealnya penyelesaian dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan atau melalui lembaga masyarakat dan lembaga hukum yang ada.

Inanna (2018) menegaskan pentingnya bagi manusia Indonesia untuk memiliki moralitas yang tinggi sebagai modal sosial dalam menjaga persatuan nasional dan dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan. Dengan moralitas yang kuat, bangsa Indonesia akan mampu memaknai peristiwa-peristiwa yang terjadi terutama yang berkaitan dengan realitas kemultikulturalan secara bijak. Hal ini akan membuat bangsa ini tidak mudah terjerumus dalam konflik horizontal maupun konflik yang bersifat destruktif. Moralitas juga menjadi bukti nyata bahwa bangsa Indonesia masih berpegang teguh pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perlindungan dan keberkahan Tuhan akan terus menyertai bangsa ini, sebagaimana telah dibuktikan dalam berbagai momen sejarah seperti kemerdekaan tahun 1945, peristiwa 1966, krisis moneter 1998, dan kejadian-kejadian besar lainnya.

Nilai, moral, dan etika yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia perlu diinternalisasikan kepada peserta didik melalui Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari pendidikan multikultural. Kita tentu tidak ingin Indonesia kehilangan generasi penerus yang berkarakter, unggul, dan kompeten. Oleh karena itu, persiapan yang matang sangat diperlukan. Realitas Indonesia sebagai bangsa yang multikultural harus diwariskan secara berkelanjutan sebagai bagian dari gerakan moral yang dilakukan secara sukarela dan penuh komitmen karena diyakini kebenaran serta manfaatnya oleh peserta didik. Pernyataan ini dikuatkan oleh (Fathurrosi, 2018) yang menyatakan bahwa nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat akan terus diamalkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya, seperti halnya nilai-nilai Pancasila yang telah hidup dan berakar dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu,

eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural perlu dioptimalkan, terutama dalam membentuk moralitas peserta didik sebagai generasi penerus bangsa.

Dengan landasan rasional dan struktur keilmuannya, Pendidikan Kewarganegaraan sangat mendukung upaya mewujudkan tujuan pembentukan karakter dan moral peserta didik. Hal ini disebabkan karena fokus utama kajian dalam Pendidikan Kewarganegaraan mencakup ideologi Pancasila serta nilai-nilai dan moral. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Pendidikan Kewarganegaraan kerap diidentikkan sebagai pendidikan karakter atau pendidikan nilai dan moral. Pada hakikatnya, tujuan dari pendidikan ini adalah mempersiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang baik dan cerdas, memahami hak dan kewajibannya, serta mampu berkontribusi secara positif bagi negara.

Menurut Dwintari (2017) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan karakter karena memiliki tujuan dalam membentuk peserta didik yang berkepribadian Pancasila, seperti memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung keadilan dan peradaban, menjaga persatuan, bersikap demokratis, serta mendukung terwujudnya keadilan sosial. Sebagai pendidikan nilai dan moral, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kompetensi yang kuat dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik, sekaligus membentuk moralitas yang dilandasi semangat kepahlawanan. Moralitas yang diharapkan melalui pembelajaran ini adalah terbentuknya peserta didik yang menjunjung tinggi integrasi nasional, menjaga kedamaian masyarakat, serta melestarikan nilai dan budaya yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

Dalam perannya sebagai pendidikan moral, Pendidikan Kewarganegaraan juga menanamkan keyakinan terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, proses pembelajarannya diarahkan untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. Peserta didik yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang baik akan lebih mudah menerima realitas kemultikulturalan bangsa, karena memandang keberagaman tersebut sebagai anugerah dan kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa. (Nanggala, 2020) menyatakan bahwa menjadi bangsa yang multikultural adalah kodrat bagi Indonesia. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan perlu memberikan landasan yang bersifat filosofis, etis, yuridis, dan sosiologis agar prinsip keadilan dan kedamaian dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. (Suharno, 2016) juga mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan nilai dan moral, karena substansi materinya relevan serta selaras dengan tujuan membentuk warga negara yang berkarakter Pancasila.

Dalam rangka mengoptimalkan peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan moral, peserta didik perlu dibimbing agar secara sukarela menerima realitas keberagaman bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, idealnya digunakan pendekatan pembelajaran kontekstual. Pendekatan ini terbukti memiliki banyak keunggulan selain mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kemultikulturalan kepada peserta didik, juga bersifat menyenangkan serta mendorong kreativitas siswa. Pendidikan multikultural sangat memungkinkan untuk dikolaborasikan dengan pembelajaran kontekstual melalui beberapa tahapan sebagai berikut (Warpala, 2019): 1) Memberikan landasan filosofis yang kuat, 2) Mengintegrasikan teori kemultikulturalan dengan teori-teori ilmu sosial serta tujuan pembelajaran kontekstual, 3) Menerapkan strategi pembelajaran yang relevan dan mendukung, 4) Mengidentifikasi keragaman budaya Indonesia sebagai sumber utama dalam pembelajaran kontekstual.

Faktanya, membentuk peserta didik yang bermoral bukanlah hal yang mudah. Proses ini merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun manusia Indonesia yang beradab. Oleh karena itu, diperlukan peran nyata dari setiap guru, khususnya guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai ujung tombak pendidikan multikultural, untuk mampu membentuk peserta didik yang memiliki karakter Pancasila. Peserta didik yang berkarakter Pancasila merupakan representasi individu yang memiliki kapasitas unggul dalam dimensi spiritual, intelektual, dan emosional. Mereka diharapkan mampu menerima dan menjaga realitas kemultikulturalan bangsa. Oleh karena itu, setiap guru dituntut untuk memahami pentingnya hal tersebut, dan dengan penuh kesadaran mentransformasikan pemahaman itu kepada peserta didik.

Proses pembelajaran tidak boleh bersifat satu arah yang berpotensi mengekang hak peserta didik untuk bertanya, berpikir kritis, bertindak, dan menghayati nilai-nilai kebangsaan. Sebaliknya, pembelajaran harus menjadi sarana dalam menyampaikan pemahaman yang komprehensif, baik melalui pendekatan rasional maupun emosional, sehingga peserta didik dapat mengambil pelajaran berharga dari keberagaman yang ada. Peran guru dalam pendidikan multikultural secara eksplisit meliputi: 1) Membangun paradigma kemultikulturalan, 2) Menumbuhkan sikap saling menghargai dalam keberagaman, 3) Menanamkan kepedulian sosial, 4) Menumbuhkan sikap anti-diskriminasi terhadap etnis, dan 5) Membangun sikap anti-diskriminasi terhadap individu dengan perbedaan kemampuan (Kusnadi dan Assa'diyah, 2020).

Peran guru, khususnya dalam mata pelajaran maupun mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, sangat krusial dalam membentuk moralitas peserta didik agar mereka secara sukarela menerima dan menjaga keberagaman budaya Indonesia. Berdasarkan pemahaman tersebut, setiap guru harus tetap menjaga integritas dan kesetiaan terhadap dasar negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika. (Widiyono, 2018) menegaskan bahwa “guru memiliki peran vital dalam menyukseskan pendidikan multikultural, karena kehadirannya dapat membantu siswa memahami nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia (HAM), keadilan, dan keberagaman, sehingga melahirkan peserta didik yang cinta damai serta menolak segala bentuk penindasan dan diskriminasi.” Dengan tingkat moralitas yang tinggi, masyarakat Indonesia akan mampu menerapkan budaya toleransi, saling menghormati, serta menghargai perbedaan, yang pada akhirnya dapat meminimalkan resistensi sosial akibat isu-isu yang berpotensi menimbulkan disintegrasi. Dinamika perkembangan keilmuan dalam Pendidikan Kewarganegaraan memang harus disesuaikan dengan kemajuan dan kebutuhan zaman. Namun, hal tersebut tidak mengubah substansi dasar dan tujuan utamanya, yakni membentuk peserta didik yang berjiwa Pancasila.

Sebagai pendidikan nilai dan moral, Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu memberikan pemahaman yang komprehensif serta informasi yang argumentatif mengenai pentingnya menerima dan merawat keberagaman bangsa. Sebagai pembelajaran yang berorientasi pada internalisasi nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mengantarkan Indonesia menuju peradaban yang lebih tinggi. Menerima dan merawat kemultikulturalan bangsa, serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan perdamaian dan menjaga integrasi nasional, merupakan wujud nyata dari implementasi konsep warga negara yang bermoral. Hal ini sekaligus menjadi bentuk rasa syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

KESIMPULAN

Mayoritas mahasiswa merasa materi dan dosen cukup mendorong sikap terbuka, namun masih ada ruang untuk memperdalam diskusi dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kampus sehari-hari. Secara umum, Pendidikan Kewarganegaraan dianggap berperan penting dalam membentuk mahasiswa yang inklusif, toleran, dan siap hidup dalam masyarakat majemuk

Keberagaman budaya di Indonesia sebagai bangsa yang multikultural merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita perlu menerimanya dengan penuh kesadaran dan komitmen untuk merawatnya. Sikap ini mencerminkan tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan, sekaligus menunjukkan jati diri sebagai warga negara yang baik dan cerdas. Pendidikan Kewarganegaraan sangat relevan untuk dioptimalkan sebagai sarana pendidikan multikultural. Hal ini ditopang oleh tujuan serta struktur keilmuannya yang secara eksplisit berfokus pada penguatan nilai-nilai kebinekaan dan upaya menjaga keberagaman bangsa. Tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi berbagai praktik negatif seperti ketidakadilan, kekerasan, konflik horizontal, penindasan, dan diskriminasi.

Sebagai pendidikan multikultural, Pendidikan Kewarganegaraan menyediakan dasar teoritis dan informasi yang argumentatif agar peserta didik memiliki pemahaman mendalam terkait filosofi, esensi, dan urgensi menjaga kemajemukan bangsa. Dengan pemahaman tersebut, peserta didik diharapkan dapat secara sukarela menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kedudukannya sebagai pendidikan yang menanamkan nilai dan moral, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki orientasi dan kapasitas keilmuan yang kuat untuk menginternalisasikan nilai-nilai luhur kepada peserta didik. Tujuannya adalah membentuk karakter dan moralitas peserta didik agar memiliki semangat yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Moralitas yang diharapkan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari pendidikan multikultural adalah terbentuknya peserta didik yang menjunjung tinggi integrasi nasional, menjaga perdamaian sosial, serta melestarikan nilai dan budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, idealnya berbagai temuan, konsep, dan teori yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan perlu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kompleks, khususnya yang berkaitan dengan ketidakadilan, konflik horizontal, serta belum optimalnya pencapaian kesejahteraan umum. Termasuk di dalamnya adalah kajian Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural, yang berfokus pada temuan dan substansi materi yang mendukung pemahaman serta penerimaan terhadap realitas kemajemukan bangsa.

Rasionalisasi mengenai pentingnya menerima realitas kemultikulturalan perlu terus dikembangkan, terutama dalam bentuk sikap dan tindakan nyata untuk menjaga keberagaman tersebut. Dalam hal ini, baik pemangku kebijakan maupun kalangan akademisi memegang peran

penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan multikultural di Indonesia. Pemerintah sebagai pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mewujudkan keadilan sosial, dituntut untuk memiliki skema dan program kerja yang terarah dan komprehensif. Program tersebut perlu difokuskan pada peningkatan literasi masyarakat, pemenuhan hak-hak warga negara, pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi, pencegahan konflik berbasis SARA, serta penegakan hak asasi manusia. Tujuan akhirnya adalah menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, demokratis, dan modern di tengah kebhinekaan bangsa.

Tak dapat dipungkiri, akademisi juga memiliki peran strategis dalam menjaga keberagaman budaya dan sosial bangsa. Hal ini terutama terkait dengan upaya merumuskan konsep, teori, serta temuan yang relevan dalam memberikan landasan argumentatif guna mendukung pemahaman dan penerimaan terhadap kemultikulturalan. Penelitian dalam jurnal ini menitikberatkan pada pentingnya merasionalisasi urgensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk dioptimalkan sebagai pendidikan multikultural. Hal ini didukung oleh struktur keilmuannya yang kuat serta posisinya yang strategis dalam kurikulum nasional. Oleh karena itu, penting bagi para peneliti selanjutnya untuk melanjutkan riset-riset terkait isu kemultikulturalan di Indonesia. Penelitian tersebut diharapkan dapat menghasilkan temuan dan konsep yang lebih komprehensif, sekaligus mengkaji dari sudut pandang filosofis apakah kajian pendidikan multikultural dapat berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Mengingat, pendidikan multikultural memiliki pengaruh besar terhadap dinamika keilmuan nasional yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Nanggala. (2020). Analisis Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Dwintari, J. W. (2017). Kompetensi Kepribadian Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Penguatan Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 51-57.
- Fathurrosi. (2018). Kesaktian Pancasila dalam Membangun Kesadaran dan Keamanan Bangsa Indonesia. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 6(1), 115-129.
- Inanna. (2018). Peran Pendidikan dalam Membangun Karakter Bangsa yang Bermoral. *JEKPEND: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 1(1), 27-33.
- JPTAM. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pendidikan Multikultural.
- JPTAM. (2021). Warga Negara Berbasis Multikulturalisme dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

- Jurnal LLDIKTI. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Multikultural.
- Kusnadi, A., & Assa'diyah, F. (2020). Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengimplementasikan Pendidikan Multikultural Berbasis Nilai-Nilai Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nasional Plus Tunas Global Kota Depok. *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 8(1), 1-18.
- Kusumaningrum, A. F. (2019). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural di Era Revolusi Industri 4.0. Universitas Sebelas Maret.
- Nanggala, A. (2020). Memaknai Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Widya Wacana*, 15(1), 16-22.
- Suharno. (2016). Pengembangan Aspek Moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan SD dan SMP: Respons atas Realitas Keprihatinan Moral. *Jurnal Civics*, 13(2), 162-171.
- Warpala, I. W. S. (2019). Pembelajaran Kontekstual: Sebuah Inovasi Penerapan Pendidikan Multikultural dan Belajar untuk Penemuan. *Media Edukasi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(1), 21-27.
- Widiyono, S. (2018). Peran Guru dalam Mengimplementasikan Pendidikan Multikultural. *Elementary School: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran ke-SD-an*, 5(2), 282-290.